

ANALISIS PAGU INDIKATIF BADAN KEAMANAN LAUT



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

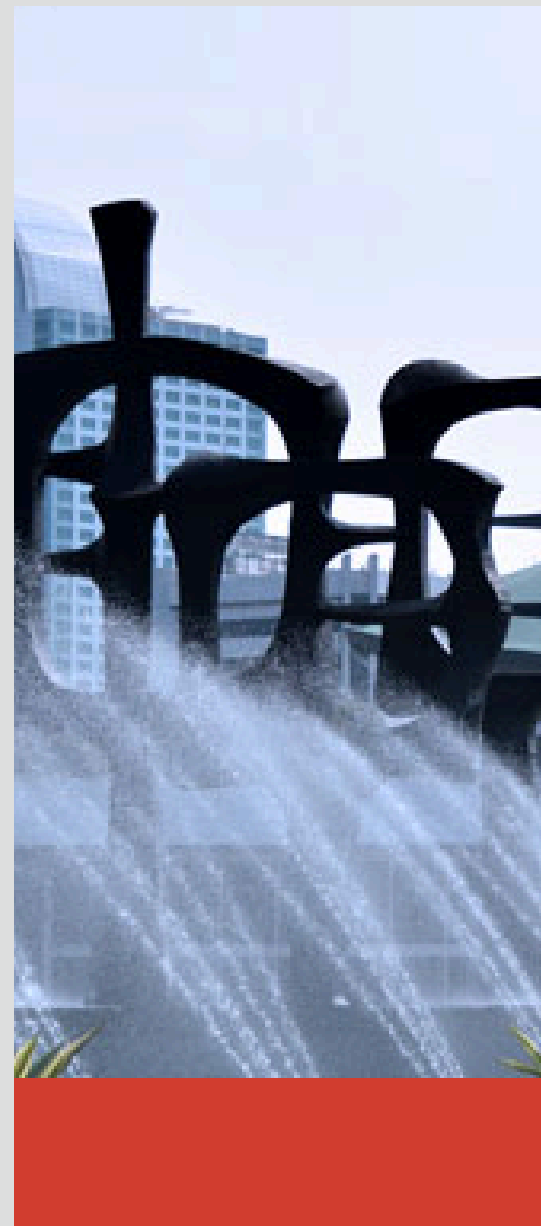
Penulis:

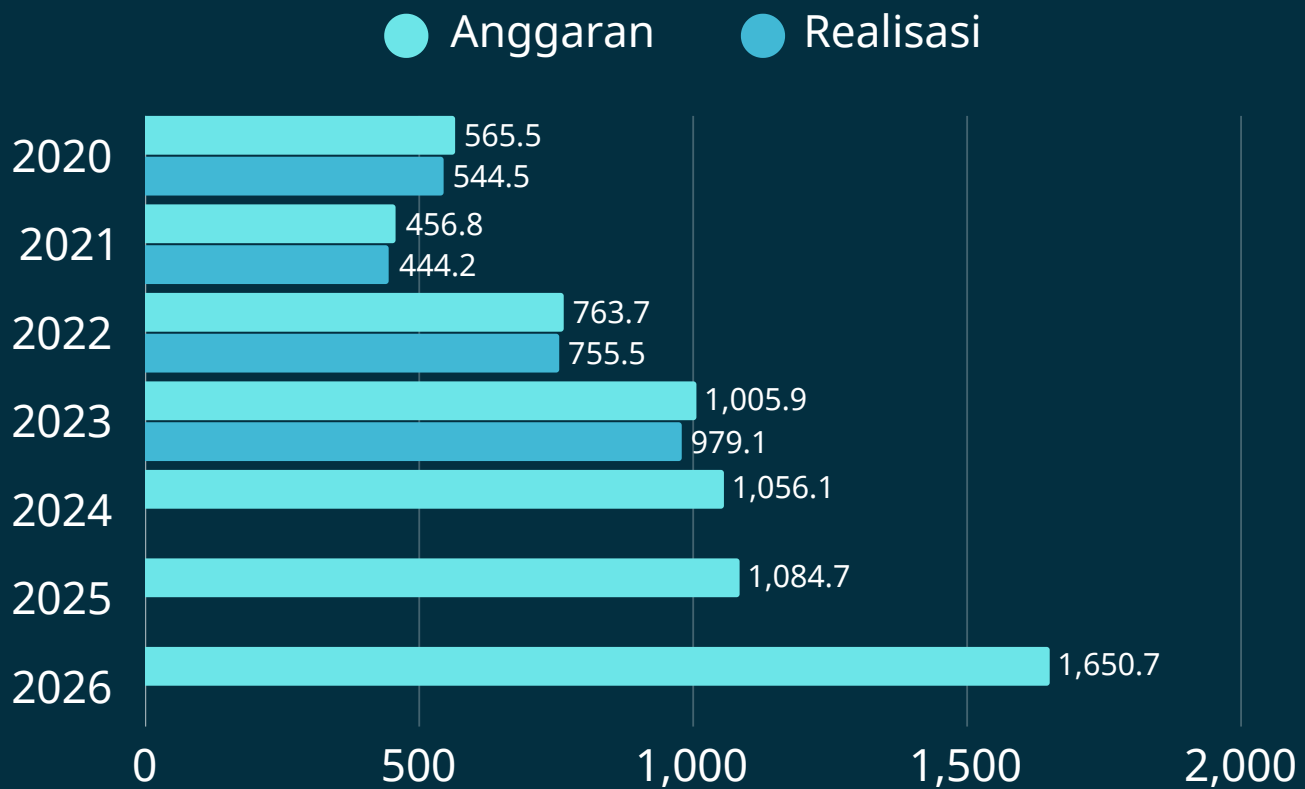
Robby A. Sirait, M.E., Ade Nurul Aida, M.E., Leo Iskandar, S.E.

JUNI 2025

Daftar Isi

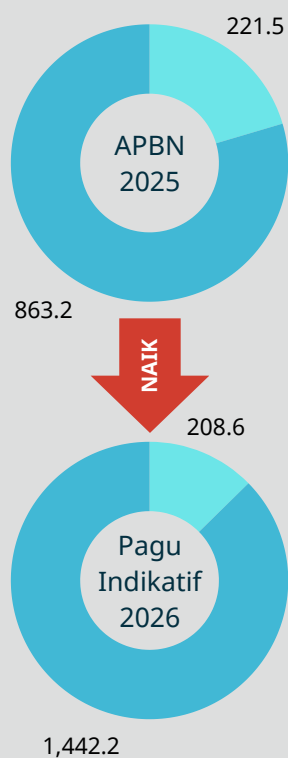
Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
Bakamla dalam RPJMN 2025-2029	06
Indeks Keamanan Laut Nasional	09





Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2024-2025, KEM PPKF 2026

*Dalam miliar rupiah



Pagu Indikatif 2026

Pagu Indikatif Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2026 sebesar Rp1.650,7 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp208,6 miliar dan Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Rp1.442,2 miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut naik sebesar 52,18 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp1.084,7 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Program Dukungan Manajemen

Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Overview Anggaran 2020-2026

HALAMAN 3



Realisasi Anggaran 2020-2023

Sepanjang tahun 2020-2023, realisasi anggaran Bakamla selalu di atas 96 persen, dengan realisasi tertinggi sebesar 98,93 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, Bakamla mendapat tambahan anggaran sebesar Rp123,3 miliar dari pagu awal Bakamla sebesar Rp882,6 miliar yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan patroli dan penguatan sistem informasi di Bakamla.



Proporsi Terbesar Anggaran Bakamla Dialokasikan pada Program Utama Bakamla

Sejak tahun 2022 hingga 2025, proporsi terbesar anggaran Bakamla dialokasikan untuk Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan rata-rata per tahun sebesar 76,50 persen. Proporsi tersebut semakin meningkat menjadi sebesar 87,36 persen dari Pagu Indikatif Bakamla Tahun 2026.



Porsi Belanja Barang Merupakan Jenis Belanja Terbesar

Sepanjang tahun 2020-2023, proporsi terbesar anggaran Bakamla berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang dengan rata-rata per tahun sebesar 55,6 persen. Kemudian diikuti belanja modal dan belanja pegawai masing-masing sebesar 32,9 persen dan 11,5 persen.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4



Target Keluaran/Output 2025

- Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan: 7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
- Koordinasi: 7 kegiatan
- Kerja Sama: 13 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
- Sosialisasi dan Diseminasi: 160 orang
- Penanganan Perkara: 22 Perkara, Berkas Perkara
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: 16 Kelompok Masyarakat
- Operasi Bidang Keamanan: 147 Operasi, Hari Operasi
- Data dan Informasi Publik: 20 layanan, dokumen, publikasi, wilayah, peta, data, lokasi
- Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan: 6 Unit, Paket
- OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan: 14 Unit
- Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan: 855 Orang, Kegiatan
- Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan: 2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
- Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan: 2 Unit, Kawasan

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 5

→ Target Outcome 2025

- Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- Meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut
- Meningkatnya kapasitas sistem informasi/sistem peningkatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi
- Meningkatnya kualitas regulasi dan penanganan pelanggaran keamanan dan keselamatan laut
- Meningkatnya diplomasi maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral & multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Bakamla dalam RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 2 (PN 02) Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
PROGRAM PRIORITAS (PP)	02.06. Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi			
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia			
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut 02. IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut 03. IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut 04. IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut			
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	02.06.01. Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	02.06.02. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	02.06.03. Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan Choke Point	02.06.04. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah NKRI	01. Terwujudnya penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	01. Terwujudnya Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Peningkatan Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut, ALKI, dan Choke Point	01. Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut

**INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

01. Persentase kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut

01. IKLN Dimensi Kapasitas Patroli
02. Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI

01. IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan
02. Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional

01. Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan

Kemenlu berkewajiban menjalankan PP 02.06 “Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi” guna menopang pencapaian salah satu target indikator PN 02, yakni Indeks Kemananan Laut Nasional sebesar 64 pada 2029 dengan baseline 59 pada 2024.

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS
(PP 02.06)**

- Nilai IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut di 2029 ditargetkan sebesar 84,5 dengan baseline 2024 sebesar 67.
- Nilai IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut di 2029 ditargetkan sebesar 64 dengan baseline 2024 sebesar 48.
- Nilai IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut di 2029 ditargetkan sebesar 69,5 dengan baseline 2024 sebesar 67.
- Nilai IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut di 2029 ditargetkan sebesar 34 dengan baseline 2024 sebesar 33.

Dalam rangka mencapai 4 target indikator PP 02.06 “Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi” tersebut, Kemenlu berkewajiban menjalankan 4 Kegiatan Prioritas, yakni KP 02.06.01, KP 02.06.02, KP 02.06.03 dan KP 02.06.04

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**
**Target KP
02.06.01:**

- Persentase kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut di 2029 ditargetkan sebesar 87,5 persen dengan baseline 2024 sebesar 25 persen.

Target KP 02.06.02:

- Nilai IKLN Dimensi Kapasitas Patroli di 2029 ditargetkan sebesar 69 dengan baseline 2024 sebesar 68.
- Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI di 2029 ditargetkan sebesar 15 persen dengan baseline 2024 sebesar 5,19 persen.

**Target KP
02.06.03:**

- Nilai IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan di 2029 ditargetkan sebesar 68,5 dengan baseline 2024 sebesar 68.
- Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional di 2029 ditargetkan sebesar 100 persen dengan baseline 2024 sebesar 100 persen.

**Target KP
02.06.04:**

- Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan di 2029 ditargetkan sebesar 15 persen dengan baseline 2024 sebesar 4,2 persen.

PROYEK PRIORITAS**KP 02.06.01:**

- Kerja Sama Keamanan Laut
- Kerja Sama Patroli Internasional

KP 02.06.02:

- Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut
- Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut

KP 02.06.03:

- Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut
- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat

KP 02.06.04:

- Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel
- Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel

Indeks Keamanan Laut Nasional

Dimensi Kapasitas Patroli Bakamla 2023

Uraian	Riil	Referensi	Persentase Riil
Hari Patroli Pesawat dan/atau Helikopter	32	300	10,7
Hari Patroli Kapal	90	240	37,5
Aset Patroli Pesawat dan/atau Helikopter	1	24	4,2
Aset Kapal Patroli	32	60	53,3
Cakupan Area Pesawat dan/atau Helikopter (km2)	1.083.909	6.400.000	16,9
Cakupan Area Kapal Patroli (km2)	3.281.800	6.400.000	51,3
Target Area yang Menjadi Prioritas Pengawasan	9	36	25,0



Kapasitas Patroli yang Dilakukan Bakamla Belum Optimal

Masih rendahnya hari patroli, baik pesawat dan/atau helikopter maupun kapal, tidak terlepas dari terbatasnya kapasitas sarana prasarana patroli yang dimiliki Bakamla, baik dalam bentuk aset patroli pesawat dan/atau helikopter maupun aset kapal patroli. Keterbatasan aset tersebut berimplikasi pada masih relatif rendahnya cakupan area patroli terhadap luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sebesar 6,4 juta km2 yang menjadi wilayah kerja operasi keamanan laut yang dilaksanakan Bakamla. Keterbatasan tersebut berdampak pada masih rendahnya realisasi target area yang menjadi prioritas pengawasan.

Indeks Keamanan Laut Nasional

Dimensi Kapasitas Pemantauan Bakamla 2023

Uraian	Riil	Referensi	Persentase Riil
Stasiun Pemantauan	18	35	51,4
Cakupan Area Stasiun Pemantauan (km2)	172.909	6.400.000	2,7
Pembinaan Masyarakat Pesisir dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut	7	40	17,5



Kapasitas Pemantauan yang Dilakukan Bakamla Belum Optimal

Stasiun pemantauan yang dimiliki Bakamla hanya sebanyak 18 stasiun atau setara 51,4 persen dari kebutuhan ideal sebesar 35 stasiun. Cakupan area stasiun pemantauan juga relatif masih rendah, yakni hanya 172.909 km2 atau 2,7 persen dari 6,4 juta km2 yang harus dipantau. Pembinaan masyarakat pesisir guna membantu aparat penegak hukum di laut dalam menjalankan pengawasan juga masih relatif rendah. Bakamla baru dapat melakukan pembinaan terhadap 7 kelompok binaan atau setara 17,5 persen dari jumlah ideal kelompok pembinaan yang sebesar 40 kelompok.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)